



Sempat Gagal Tender ✓

Balai Budaya Sedot Anggaran Rp 41 Miliar

Denpasar (Bali Post) -

Tahun anggaran 2017 ini, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar telah berhasil melakukan lelang beberapa jenis pekerjaan. Hingga akhir Mei lalu, sedikitnya 108 paket pekerjaan telah diproses. Dari jumlah itu, dua paket sempat mengalami gagal tender, yakni balai budaya dan SDN 6 Seseetan. Namun, setelah melakukan proses tender ulang akhirnya berhasil menentukan pemenangnya. Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara jajaran Komisi I dan III DPRD Denpasar dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar, Dinas PUPR dan Disdikpora, beberapa waktu lalu.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar Ir. Maria Antonia Dezire Mulyani, M.Si. mengungkapkan, proyek balai budaya sempat gagal tender dan kini sudah ada pemenangnya. Dikatakan, proyek pembangunan lanjutan balai budaya yang berada di atas sentral parkir Lumintang ini sudah dikerjakan pihak rekanan. Akibat pengerjaan balai budaya ini, sentral parkir yang biasanya digunakan untuk menampung para pegawai dan tamu yang berkunjung ke Gedung Sewaka Dharma, kini ditutup sementara. Sentral parkir ini mampu menampung 154 unit kendaraan roda empat dan 328 unit roda dua. "Parkir sementara dipindah ke parkir Gedung Sewaka Dharma, karena sentral parkir ditutup akibat adanya pengerjaan proyek balai budaya," katanya yang dibenarkan oleh salah seorang petugas jaga di Gedung Sewaka Dharma.

Dezire Mulyani menambahkan, pembangunan balai budaya ini dianggarkan dana pagu sebesar Rp 46,9 miliar. Namun setelah lelang, nilai kontraknya hanya Rp 41,4 miliar yang dimenangkan oleh PT Bianglala Bali dengan nomor kontrak 640/2525/DPUPR/2017 tertanggal 10 Mei 2017. Proyek ini ditangani konsultan perencana PT Kencana Adi Karma dan konsultan pengawas PT Narada Karya.

Seperti diberitakan sebelumnya, balai budaya ini merupakan kelanjutan dan proyek sentral di kawasan Gedung Sewaka Dharma, Lumintang. Sebelumnya sentral parkir telah digarap secara bertahap sejak 2014 lalu. Pada tahap pertama telah menelan dana sebesar Rp 13,4 miliar yang digarap PT Tunas Jaya Sanur. Sedangkan pada tahap II yang digarap PT Undagi Jaya Mandiri menelan dana Rp 9 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Denpasar Ir. Eko Supriadi berharap pengawasan terhadap proyek fisik lebih ditingkatkan. Pihaknya tidak menginginkan ada lagi proyek molor seperti tahun-tahun sebelumnya. (kmb12)

Edisi : Senin, 12 Juni 2017

Hal : 2



Lobi Izin Toko Modern

Diduga, Pengusaha Gunakan Calo

Gianyar (Bali Post) -

Menjamurnya toko modern berjaringan di Kabupaten Gianyar tidak bisa dilepaskan dari praktik percaloan. Bahkan seorang mantan kepala dinas yang mengelola perizinan di Kabupaten Gianyar mengaku pernah ditawari uang ratusan juta rupiah untuk membantu mengurus izin.

Informasi dihimpun, daftar permohonan izin toko modern berjaringan sudah cukup panjang. Namun, tidak semua pejabat mau mengeluarkan izin ini. Di sinilah sejumlah perantara kerap mengambil peran, berkomunikasi dengan instansi terkait guna memuluskan proses perizinan.

Tidak sedikit di antaranya yang menawarkan imbalan berupa uang untuk hal tersebut. Bahkan dari informasi, sejumlah toko modern tak berizin alias bodong sampai sekarang berani beroperasi karena pemiliknya secara rutin menyetorkan uang kepada pihak-pihak tertentu.

Mantan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang sekarang bernama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DP-MPTSP) Made Oka Wijaya mengakui adanya praktik percaloan dalam mengurus izin toko modern di Kabupaten Gianyar. Diungkapkannya, saat menjabat kepala dinas perizinan, dia pernah ditawari uang Rp 250 juta untuk menandatangani izin sebuah toko modern berjaringan.

"Tawaran itu tegas saya tolak. Saya katakan tidak ada izin baru untuk toko modern atas perintah bupati," ungkap Oka Wijaya saat ditemui, Minggu (11/6) kemarin.

Selama delapan bulan menjabat sebagai Kepala BPPT Gianyar, yakni dari Juni 2013 hingga Februari 2014, dia juga pernah didatangi seorang calo. Calo ini meminta dikeluarkannya izin tiga toko modern berjar-

ingan di wilayah Ubud. Bahkan perpanjangan tangan investor itu meminta Oka menyebutkan nilai uang yang diinginkan. "Bapak minta berapa untuk izin tiga lokasi ini? Uang ada Pak," ujar Oka menirukan ucapan calo tersebut.

Pejabat yang kini menjadi staf ahli Bupati Gianyar ini pun mengakui selama menjadi Kepala BPPT hanya mengeluarkan satu izin toko modern berjaringan yaitu di Desa Mas, Ubud. Itupun karena desakan masyarakat.

Disebutkan kala itu masyarakat dijanjikan CSR oleh pemilik usaha dan dalam jangka waktu beberapa tahun akan menjadi milik desa adat. "Di samping izinya dari bawah lengkap, Pak Bupati juga mengizinkan. Ya sebagai bawahan bupati saya keluarkan izinnya," jelasnya.

Oka menegaskan, selama menjadi Kepala BPPT ia tidak mau melakukan pungli hanya untuk mengeluarkan izin. Jika prosedur perizinan tidak dipenuhi, pasti akan ditolak. Dia pun

mengaku kurang nyaman selama menjabat sebagai pimpinan di instansi di bidang perizinan lantaran banyaknya tekanan yang ia terima.

Sebab itulah, saat dimutasi menjadi Staf Ahli Bupati Gianyar ia merasa bebas. "Saat mutasi, setelah nama saya disebutkan sebagai Staf Ahli, tanpa sadar dan secara spontan saya mengucapkan kata merdeka," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD Gianyar Wayan Tagel Winarta mengaku terus berkoordinasi dengan eksekutif terkait maraknya toko modern bodong yang tetap beroperasi. Namun, sejauh ini belum ada tindakan tegas dari instansi terkait. Dia pun meminta pemerintah menutup sementara puluhan toko modern yang belum mengantongi izin. "Sekarang kan sedang dibuatkan kajian oleh Unud, jadi sebelum hasil kajian itu dipastikan, baiknya yang belum berizin ini ditutup dulu seluruhnya untuk sementara waktu," ucapnya. (kmb35)

Edisi : Senin, 12 Juni 2017

Hal : 9



Pembangunan "Shortcut" Dianggarkan Rp 350 Miliar

Singaraja (Bali Post) -

Wewujudkan pembangunan *shortcut* di Desa Wanagiri hingga Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp 350 miliar. Kebutuhan anggaran sebesar itu untuk pembangunan *shortcut* sepanjang 1,5 kilometer, selain karena medannya paling berat dibandingkan lokasi *shortcut* yang lain.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Buleleng Ketut Suparta Wijaya, Minggu (11/6) kemarin, mengatakan kepastian pembangunan *shortcut* itu setelah pemkab secara khusus mengundang Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Jalan Metro Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-PR) Agung Sanjaya yang didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan *Shortcut* Jalan Mengwitani-Singaraja, beberapa waktu lalu.

Tender fisik pembangunan *shortcut* di Desa Wanagiri dan Desa Gitgit dilakukan 2018 mendatang. Menyusul kepas-

tian itu, pemerintah pusat melalui APBN sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar. Anggaran dana sebesar itu dipastikan belum mampu menuntaskan pembangunan *shortcut*. Pemerintah pusat sudah mengatur skema proyek *shortcut* ini dibangun dengan model *multiyears* (bertahap) "Sepenuhnya dana itu ditanggung pemerintah pusat. Masih menunggu penyempurnaan *Detail Engineering Design* (DED) dan menginjak 2018 nanti tender fisik sudah dimulai," katanya.

Menurut Suparta Wijaya, pertimbangan mengalokasikan anggaran sebesar itu

tidak lepas karena kondisi di lapangan yang dibangun *shortcut* medannya paling berat dibandingkan lokasi *shortcut* lainnya. *Shortcut* yang melintasi di dua wilayah itu panjangnya sekitar 1,5 kilomitere. Jalan yang semula berkelok-kelok itu akan dibuat lurus dengan konstruksi jalan layang. Karena konstruksinya mirip jalan layang, *shortcut* ini dibangun dengan konstruksi berteknologi tinggi. "Pemotongan dan pengurukan tanah tidak terlalu banyak, akan tetapi memerlukan anggaran tidak sedikit, sehingga pusat melakukan proyek ini bertahap," tegasnya. (kmb38)



Bali Post/kmb38

"Sepenuhnya dana itu ditanggung pemerintah pusat. Masih menunggu penyempurnaan *Detail Engineering Design* (DED). Tender fisik dimulai 2018 mendatang."

Kadis PU-PR Buleleng
Ketut Suparta Wijaya

Edisi : Senin, 12 Juni 2017

Hal : 11



Dihukum Empat Tahun, Winasa Banding

Denpasar (Bali Post) -

Majelis hakim yang menyidangkan perkara dugaan korupsi perdin bupati sudah menjatuhkan hukuman empat tahun pada terdakwa mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa. Setelah berunding dan mencermati besarnya hukuman dan denda serta kewajiban membayar uang pengganti, Winasa memilih menempuh upaya hukum banding.

Hal tersebut dibenarkan kuasa hukumnya, Simon Nahak, Minggu (11/6) kemarin. "Setelah kami cermati dan diskusikan secara bersama dengan Pak Winasa, hukuman tersebut kami pandang terlalu berat. Apalagi ada kewajiban membayar hingga Rp 797 juta," ucapnya.

Pria yang kini menjabat Kepala Prodi

Magister Hukum Univeristas Warmadewa itu menambahkan, secara hukum sebagaimana waktu yang diberikan majelis hakim, pihaknya memanfaatkan waktu sepekan menyikapi vonis tersebut. Dalam sidang dengan agenda putusan, Jumat (9/6) lalu, majelis hakim memberikan kesempatan selama sepekan untuk pikir-pikir, baik pada jaksa selaku penuntut maupun pada terdakwa atas vonis empat tahun itu. "Tahap banding sebagai upaya hukum yang kami tempuh, akan disampaikan pekan ini," tandas Simon Nahak.

Seperti diberitakan, majelis hakim yang menyidangkan perkara perdin dengan terdakwa Winasa menyatakan Winasa terbukti bersalah dalam kasus korupsi perjalanan dinas bupati. Oleh majelis ha-

kim pimpinan I Wayan Sukanila, Winasa dihukum selama empat tahun penjara.

Di samping itu, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Simon Nahak dkk., dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Majelis hakim tipikor juga memberikan hukuman tambahan, yakni membayar uang pengganti sebagai akibat kerugian keuangan negara Rp 797.554.800.

Jika dalam waktu satu bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita untuk dilelang. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk menutupi kerugian keuangan negara, dipidana penjara selama satu tahun. (kmb37)

Edisi : Senin, 12 Juni 2017

Hal : 5



✓ Resmikan Balai Banjar Angas Sari dan Serahkan Hibah di Ungasan
Bupati Giri Prasta Komit Wujudkan Pembangunan Menyeluruh dan Terpola

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dan anggota Komisi X DPR-RI Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., Jumat (9/6) lalu menghadiri *Karya Malaspas, Ngenteg Linggih*, sekaligus meresmikan Balai Banjar Angas Sari, Desa Ungasan yang ditandai pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti. Bupati Giri Prasta juga menyerahkan dana hibah dengan total nilai Rp 9 miliar lebih untuk kelompok masyarakat di Desa Ungasan. Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Badung diwakili Gusti Agung Anom Gumanti, Kabag Humas Putu Ngurah Thomas Yuniarta, Camat Kuta Selatan beserta Tripika Kecamatan dan tokoh masyarakat setempat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta menekankan bahwa dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), Pemkab Badung komit melaksanakan program pembangunan secara

menyeluruh dan terpola di wilayah Kabupaten badung. Penyerahan dana hibah ini sebagai salah satu bukti komitmen Pemkab Badung dalam percepatan pembangunan di desa. "Kami akui kebanyakan waktu *krama* desa habis di adat. Untuk itu, kami hadir di tengah-tengah masyarakat. Apapun kebutuhan dari *krama* Badung, kami akan penuhi karena kami sudah berkomitmen segala pembangunan di desa menjadi tanggung jawab pemerintah," tegasnya.

Untuk itu, Bupati Giri Prasta mengharapkan masyarakat Ungasan agar tetap bersatu dan dapat mendukung program pembangunan di Badung.

Sementara itu, Wayan Koster yang hadir memenuhi undangan masyarakat ini mengapresiasi kebijakan Bupati Badung yang memberikan perhatian serius pada sektor adat, seni dan budaya melalui pemberian bantuan dana hibah kepada masyarakat. Seperti dana hibah yang diberikan kepada masyarakat Ungasan

yang diarahkan untuk pembangunan pura, balai banjar dan untuk sanggar-sanggar seni. Di sisi lain, ia mengharapkan masyarakat penerima hibah agar memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Panitia I Made Duama yang juga sebagai anggota DPRD Badung melaporkan, Pemkab Badung bersama DPRD Badung telah mencairkan dana hibah tahun 2017 untuk Desa Adat Ungasan dan beberapa kelompok masyarakat Ungasan. Penerima hibah di antaranya untuk pembangunan Pura Dalem Desa Adat Ungasan sebesar Rp 7 miliar, pembuatan pondasi dan pengurukkan Pura Banjar Angas Sari Ungasan Rp 306.637.285, pemugaran Parahyangan Banjar Adat Bakung Sari Rp 833.700.000, melanjutkan pembangunan fisik balai pertemuan Banjar Suka Duka Eka Wirasa, Banjar Bakung Sari Ungasan sebesar Rp 100 juta dan membantu kelangka-



DANA HIBAH - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dan anggota Komisi X DPR-RI Dr. Ir. Wayan Koster, M.M. saat menyerahkan dana hibah di Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Jumat (9/6) lalu.

pan properti dari Sanggar Werdhi Asri Lestari (Waras) Desa Ungasan sebesar Rp 1 miliar. Total hibah yang dicairkan di Desa Ungasan mencapai Rp Rp 9 miliar lebih. Duama juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Badung yang

telah mendukung pengembangan destinasi wisata baru di Ungasan, yaitu Pantai Melasti. "Pemkab Badung telah membantu perencanaan pembuatan infrastruktur yang dibangun di Pantai Melasti sebesar Rp 20 miliar," tambahnya. (ad899)

Edisi : Senin, 12 Juni 2017

Hal : 3